

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang akan penulis sajikan pada bab ini yaitu berupa kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Tinjauan pustaka ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, dan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian. Penulisan selanjutnya adalah pembahasan kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan model serta korelasi antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen), serta pengajuan hipotesis dalam penelitian.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (Miragustia

Mayza, dkk 2015:11).

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.1.2.1. Pajak Daerah

Menurut UU no. 34 Tahun 2000 pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Adapun pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000 adalah :

1. Jenis pajak Propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air permukaan
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi (Waluyo dan Ilyas, 2002:11) :

1. Pembagian berdasarkan golongan :
 - a. Pajak langsung : adalah pajak yang pembebenannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Pajak ini dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan ketetapan waktu. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung : adalah pajak yang pembebenannya dapat dilimpahkan ke pihak lain dan pajak ini tidak dipungut secara periodik tetapi hanya apabila terjadi peristiwa tertentu. Sebagai contoh adalah pajak pertambahan nilai.
2. Pembagian menurut sifatnya :
 - a. Pajak subyektif : adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan.
 - b. Pajak obyektif : adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Sebagai

contoh adalah pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Pembagian menurut pemungutannya :

- a. Pajak pusat : adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai contoh adalah pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
- b. Pajak daerah : adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai contoh adalah pajak kendaraan, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.

Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggisebesar :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen)
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen)
- e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen)
- f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen)
- g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen)

- h. Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen)
- i. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen)
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen)
- k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

2.1.1.2.2. Retribusi Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata oleh daerah kepada pembayar/pemakai. Dalam retribusi daerah, terdapat Objek retribusi daerah yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi, yang dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Selanjutnya Retribusi Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Retribusi memiliki sifat-sifat sebagai berikut, diantaranya:

1. Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi.
2. Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi.

2.1.1.2.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Tujuan pembentukan perusahaan daerah adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Bidang usaha BUMD mencakup berbagai aspek pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah yang keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat.

2.1.1.2.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah,

diantaranya:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.2. Produk Domestik Bruto (PDB)

2.1.2.1. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Interpretasi dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa yang akan dihitung dalam kategori GDP adalah produk atau output yang berupa barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang diproduksi oleh input atau faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan maupun oleh warga negara asing yang tinggal secara geografis di negara itu. (Sunyoto 2014). Manfaat perhitungan PDB (Produk Domestik Bruto) menurut Rahardja dan Manurung adalah sebagai berikut (Prathama Rahardja and Mandala Manurung 2008):

1. Menganalisis tingkat kemakmuran suatu negara
2. Menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat
3. Mencerminkan tingkat produktivitas suatu Negara
4. Penghitungan PDB dan kegiatan-kegiatan ekonomi tak tercatat

(Underground Economy).

2.1.2.2. Konsep Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur nilai hasil produksi, pendapatan, dan atau pengeluaran nasional suatu perekonomian (Kusnendi, 2002). PDB meliputi semua produk akhir yang dihasilkan setiap orang atau perusahaan (nasional maupun asing) yang ada dalam wilayah sesuatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional ini mempunyai ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara. Pada umumnya perbandingan kondisi antar Negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya sebagai gambaran, Bank Dunia menentukan apakah suatu negara berada dalam kelompok negara maju atau berkembang melalui pengelompokan besarnya PDB, dan PDB suatu negara sama dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Herlambang, 2001) dalam Nazaruddin Fahmi Faisol (2017).

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam menghitung angka PDRB, diantaranya:

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka

waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

- a. pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, gas, dan air bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, hotel, dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidaklangsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- a. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b. pengeluaran konsumsi pemerintah

- c. pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. perubahan inventori, dan
- e. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Ada dua cara dalam penyajian PDRB yaitu:

1. PDRB atas dasar harga berlaku, menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk dimana PDRB atas dasar harga berlaku merupakan tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah.
2. PDRB atas dasar harga konstan, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

2.1.4. Investasi

2.1.4.1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor asing terhadap suatu industri yang ada di dalam negeri. Investasi merupakan bagian penting dalam suatu wilayah dan negara, karena dengan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung (Pangestu, 2017):

- a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukak dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
- b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

2.1.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tinggi rendahnya investasi di suatu wilayah, diantaranya:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah menjadi tolak ukur bagi investor dalam melakukan investasi, karena kemajuan suatu wilayah atau negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian,

untuk menarik investor dalam negeri maupun asing harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar para investor merasa tertarik untuk berinvestasi

2. Tingkat suku bunga

Menurut Nugroho (2008) suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.

3. Kemajuan Teknologi

Di zaman modern ini, teknologi merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh manusia. Bahkan, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan. Penguasaan teknologi menjadi indikator kemajuan suatu negara, karena negara dikatakan maju apabila memiliki tingkat yang tinggi dalam penguasaan teknologi. Begitupun sebaliknya, tanpa penguasaan teknologi maka negara tersebut akan tertinggal zaman. Dengan demikian, kemajuan teknologi ini merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh para investor, guna berkembangnya investasi yang ditanamkan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia menjadi peranan penting, dimana manusia adalah sebagai eksekutor dalam menjalankan suatu pekerjaan termasuk penguasaan teknologi. Teknologi perlu dikuasai oleh manusia karena dengan teknologi manusia dapat lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga manusia dituntut untuk terampil dan berwawasan luas

agar dapat menggunakan teknologi dengan baik. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan suatu industri.

5. Peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Stabilitas Politik dan Keamanan

Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain. Sedangkan stabilitas politik dan keamanan yaitu merupakan bagian penting bagi para investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. (Nugroho,2008)

2.1.4.3. Tujuan Penyelenggaraan Investasi

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, antara lain (Irman, 2021):

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.1.4.4. Jenis-Jenis Investasi

Menurut Rosyidi (2000: 169) dalam Irman (2021), jenis-jenis investasi dikelompokkan menjadi 4 kelompok, antara lain:

1. Berdasarkan unsur pendapatan nasional:

a. *Autonomous Investment* (Investasi otonom)

Investasi otonom merupakan investasi yang perubahannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dalam hal ini pendapatan nasional.

b. *Induced Investment* (Investasi Terimbas)

Adalah investasi yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.

2. Berdasarkan Subjeknya

a. *Public Investment* (Investasi Pemerintah)

Adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

b. *Private Investment* (Investasi Swasta)

Adalah penanaman modal oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

3. Berdasarkan Alasannya

a. *Domestic Investment* (Investasi Dalam Negeri)

Adalah penanaman modal dari negeri sendiri dengan berinvestasi di dalam negeri atau disebut juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

b. *Foreign Investment* (Investasi Asing)

Adalah investasi yang diperoleh dari luar negeri untuk digunakan didalam negeri guna mengoptimalkan sumber-sumber daya yang masih belum termanfaatkan atau disebut juga Penanaman Modal Asing (PMA).

4. Berdasarkan Unsur Pembentukan

a. *Gross Investment* (Investasi Bruto)

Adalah total dari keseluruhan investasi yang dilakukan oleh suatu negara pada suatu ketika atau pada waktu tertentu.

b. *Net Investment* (Investasi Netto)

Adalah hasil dari investasi bruto yang dikurangi dengan penyusutan (*depreciation*) atau disebut investasi bersih.

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2.1.5.1. Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, diantaranya:

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan,
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan

sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rumus dari TPT adalah sbb :

$$\text{TPT} = \text{PP} : \text{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

2.1.5.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Kurang keterampilan dan wawasan, sehingga penduduk kalah saing dalam dunia kerja
2. Ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja
3. Adanya kemajuan teknologi, sehingga tenaga manusia diganti dengan teknologi yang canggih
4. Rasa malas dan tidak ingin berusaha mencari pekerjaan
5. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga melahirkan pengangguran

2.1.5.3. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2004: 328) dalam Ni Komang Sopiani dan A.A Ketut Ayuningsari menyatakan bahwa terdapat dua cara untuk menggolongkan jenis-jenis pengangguran yaitu berdasarkan sumber/penyebab yang mewujudkan

pengangguran dan ciri pengangguran tersebut. Berikut jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

1. Pengangguran Normal atau Friksional adalah jenis pengangguran yang disebabkan penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.
2. Pengangguran Siklikal adalah jenis pengangguran yang disebabkan merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat di dalam perekonomian dibanding penawaran agregatnya.
3. Pengangguran Struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.
4. Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang disebabkan adanya penggantian SDM dengan teknologi/mesin dalam proses produksi.

Menurut (Sukirno, 2004: 330) dalam Ni Komang dan A.A Ketut, penggolongan jenis pengangguran berdasarkan cirinya adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran terbuka adalah pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja.
2. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran ini tercipta sebagai akibat jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya yang diperlukan.
3. Pengangguran bermusim adalah pengangguran yang tercipta akibat musim yang ada, biasanya pengangguran ini terdapat di sektor pertanian dan perikanan

4. Setengah menganggur adalah pengangguran yang tercipta akibat tenaga kerja bekerja tidak sepenuh dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal.

2.1.5.4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian

Dampak Pengangguran terhadap perekonomian, diantaranya:

- a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya (actual output) dicapai lebih rendah dari pada pendapatan nasional potensial (potential output). Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai lebih rendah dari pada tingkat yang mungkin dicapainya.
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue) pemerintah berkurang. Pengangguran yang diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh pemerintah akan semakin sedikit. Dengan demikian, pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.
- c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi, pengangguran menimbulkan dua akibat buruk pada sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti pula dengan kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Keadaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang. Kedua, pengangguran yang

diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

2.1.5.5. Upaya Mengurangi Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran perlu diperhatikan, agar setiap tahunnya tidak terjadi peningkatan. Adapun berbagai upaya yang harus dilakukan guna mengurangi tingkat pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lapangan kerja
2. Mengadakan pelatihan wirausaha
3. Meningkatkan keterampilan kerja melalui pendidikan dan pelatihan
4. Meningkatkan mutu/kualitas pendidikan
5. Memberdayakan tenaga kerja dalam negeri
6. Mendorong investasi guna meningkatkan peluang kerja bagi tenaga kerja
7. Melakukan transmigrasi

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkuat dan membandingkan hasil analisis yang dilakukan.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura (Yuniar Sri Hartati, 2017)	Variabel independen: - Investasi - PDRB Variabel dependen: - Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - Tenaga Kerja Variabel dependen: -	- Tingkat Investasi (PMA + PMDN) di Kota Jayapura selama 10 Tahun Memiliki Pengaruh namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura (PDRB) namun secara tidak langsung tingkat investasi memiliki pengaruh yang besar terhadap PAD Kota Jayapura. - Tenaga Kerja di Kota Jayapura Memiliki Pengaruh namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura (PDRB) hal ini di sebabkan perbedaan dinamika pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang ada di Kota Jayapura . Namun Tenaga kerja secara langsung memiliki pengaruh yang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>cukup besar terhadap PAD Kota Jayapura. Pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura setiap tahunnya selama 10 tahun.</p>
2.	<p>Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016 (Rini dan Fitriani, 2018)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) - Penanaman Modal Asing (PMA) <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Dependen: 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. - Penanaman modal asing yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara
3.	<p>Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, PDRB, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks – Karesidenan Kedu 2014-2018 (Bayu dan Ahmad, 2021)</p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDRB - Investasi <p>Variabel dependen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak daerah - hasil Pengelolaan kekayaan dipisahkan <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks – Karesidenan Kedu 2014-2018. - Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks – Karesidenan Kedu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2014-2018 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks – Karesidenan Kedu 2014-2018 Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Eks Karesidenan Kedu 2014-2018
4.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi Tahun 2010-2019 (Ria, dkk, 2021)	Variabel independen: - PDRB - Investasi Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - Jumlah penduduk Variabel dependen: -	- Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap PAD. Setiap kenaikan 1% dari nilai PDRB maka akan mengurangi nilai PAD Kota Cimahi sebesar 0,001%. Variabel JP memiliki pengaruh yang positif terhadap kenaikan 1% dari nilai Jumlah Penduduk maka akan menambah jumlah nilai PAD sebesar Kota Cimahi 12,468%. - Variabel I memiliki pengaruh yang negatif terhadap PAD. Setiap kenaikan 1% dari nilai Investasi maka akan mengurangi nilai PAD Kota Cimahi sebesar 0,050%. - Secara simultan mengungkapkan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Bahwa PDRB, Jumlah Penduduk, dan Investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Cimahi
5.	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Afifah, Dkk, 2018)	Variabel Independent: - PDRB Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel Independent: - Jumlah Penduduk - Pajak Hotel Variabel Dependen: -	- regional bruto, jumlah penduduk, dan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. - Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa produk domestik Regional bruto, jumlah penduduk, dan pajak hotel mempunyai pengaruh sebesar 65,2% terhadap pendapatan asli daerah, sisanya 34,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.
6.	Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya Pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai (Studi Pada Pemerintah	Variabel independen: - Investasi Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - Variabel dependen: - Belanja pegawai	- Investasi berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. - Investasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh) (Ifrizal, dkk, 2014)			baik secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
7.	Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 – 2018 Dimas dan Herniwati,2021)	Variabel independen: - PDRB Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - Inflasi - Jumlah penduduk Variabel dependen: -	- PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD - Laju Inflasi berpengaruh positif terhadap PAD. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap PAD
8.	Analisis Variabel- Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 1991-2009 (Putu Lia, 2013)	Variabel independen: - PDRB - Tingkat investasi Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - Jumlah kunjungan wisatawan Variabel dependen: -	- Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali periode 1991-2009 - Tingkat investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali periode 1991-2009 - PDRB sektor perdagangan, hotel, restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Daerah (PAD) di Provinsi Bali periode 1991-2009
9.	Analisis pengaruh tingkat inflasi, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Sukoharjo (Studi kasus periode tahun 1994-2008) (Ardhian Fajar Cahyanto, 2012)	Variabel independen: - tingkat pengangguran Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB per kapita - Tingkat inflasi Variabel dependen: -	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo - Variabel PDRB perkapita mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembentukan besarnya PAD Kabupaten Sukoharjo - Variabel Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo. - Inflasi, PDRB perkapita dan tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo.
10.	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh (Miragustia Mayza, dkk, 2015)	Variabel independen: - PDRB Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - Inflasi - Jumlah penduduk Variabel dependen:	<ul style="list-style-type: none"> - Secara simultan menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi PAD,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			-	<p>karena signifikansi berada dibawah 0,05.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara parsial menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. - Secara parsial membuktikan bahwa variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5 %).

2.2. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat memudahkan penulis dalam penelitian, maka dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan PDRB, nilai investasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

2.2.1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program- program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. (Karlina Batik

2013:122)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB nya dari tahun ke tahun.

Hubungan positif antara PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya oleh Miragustia Mayza, dkk (2015) yang menyatakan bahwa variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5 %).

2.2.2. Hubungan Nilai Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nugroho (2008) Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Pertama, investasi mendorong pertumbuhan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi) Kedua, investasi juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi kemiskinan. Berkurangnya kemiskinan akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain seperti gizi buruk, buta huruf, kejahatan dan lain-lain. Ketiga, investasi juga bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Investasi sebagai alat

pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menuruti mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah. Investasi perlu ditingkatkan agar dapat mendongkrak perekonomian daerah. Semakin banyaknya investor yang melakukan investasi, maka dapat meningkatkan pertumbuhan industri yang ada serta memberikan dampak secara tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hubungan positif antara Nilai Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dibuktikan dalam penelitian terdahulu oleh Putu Lia (2013). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara investasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2.3. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

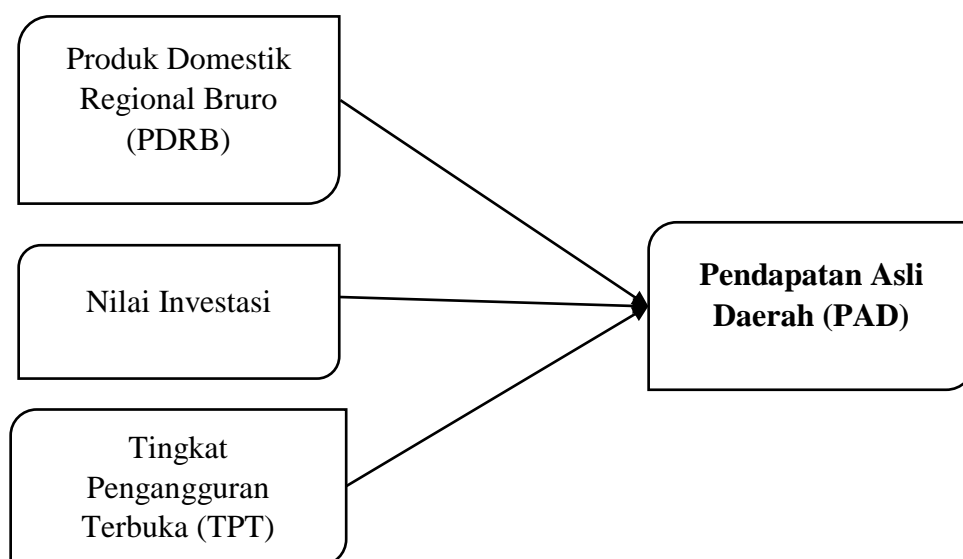
Tingkat pengangguran merupakan salah satu permasalahan bagi suatu daerah bahkan negara. Semakin banyaknya masyarakat yang menganggur, maka angka kemiskinan semakin bertambah. Disisi lain, semakin tingginya angka pengangguran di suatu daerah, maka pendapatan pemerintah daerah akan berkurang, seiring dengan banyaknya masyarakat yang tidak mampu membayar iuran wajib seperti pajak, serta banyaknya pengeluaran yang harus pemerintah anggarkan guna mensejahterakan masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara tingkat pengangguran dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Hubungan negatif antara Tingkat pengangguran dengan pendapatan asli daerah telah dibuktikan dalam penelitian terdahulu oleh Ardhian Fajar Cahyanto

(2012). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, membuktikan bahwa PDRB, nilai investasi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

Secara lebih rincinya, kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDRB dan nilai investasi berpengaruh positif sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017- 2021.

-
2. Diduga secara simultan PDRB, nilai investasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.

